

Bahan Ajar PIS:

Ilmu Sosial di Indonesia, Tindakan dan Refleksi

Oleh Herwindo

Pertama-tama saya akan memulai tulisan ini dengan pendapat yang akan saya kutip dari tulisan Ignas Kleden ini. Pendapat Karl Popper yang dikatakannya sangat terkenal, tendensi para ilmuwan untuk memberi pembuktian bersifat psikologis, sedangkan tugas untuk memalsukan diri sendiri bersifat filosofis (Popper, 1979:30). Dari sini dapat kita bentangkan permasalahannya ilmu sosial yang berkembang kekinian.

Dalam hal ini dapatlah kiranya menjelaskan keadaan ilmuwan sosial di Indonesia khususnya, Asia Tenggara pada umumnya. Karena pada dasarnya fenomena yang menjadi fakta sosial di lingkungan lokal dan regional ini sama keadaannya, refleksi jarang dilakukan bahkan dalam tindakannyapun “kering” dari pemaparan realitas sosial yang ada. Padahal refleksi diri merupakan perangkat metodologis yang terpenting bagi ilmu-ilmu sosial kritis, menurut Habermas (Habermas, 1969, 155-68).

Penelitiannya sangat “kering” dari fungsi sosialnya seorang ilmuwan sosial dan hal tersebut menjadikan ilmu sosialnya sendiri “kehilangan” makna atas apa-apa yang diteliti dan dideskripsikan sebagai sesuatu yang dikonsumsi khalayak akademis dan masyarakat umum.

Namun fenomena tersebut, bukan merupakan keadaan yang dipilih oleh setiap ilmuwan sosial dimanapun melainkan ada unsur represifitas yang bersifat laten dan halus (disublimasikan) oleh kekuatan penguasa pada zaman orde baru. Berangkat dari semua itu ilmu sosial menjadi ilmu yang kajiannya tidak holistik, terdikotomis (fragmentasi), monoton dalam pengembangan, minim akan etika dan tidak bebas nilai. Fakta akan hal tersebut dapat dilihat pada media cetak harian *The Jakarta Post* yang terbit 26 Oktober 1992, yang menulis mengenai kongres nasional partai politik penguasa orde baru (Golkar) dalam penguasaan ruang sosio-politik untuk mendapatkan stabilitas politik dan dengan berbagai cara mempertahankan “ideologi” pembangunan nasional.

Realitas tersebut terjadi karena ada penekanan terhadap realitas yang akan dibentuk oleh penguasa orde baru guna memperlancar pembangunan nasional yang diprogram oleh penguasa waktu itu. Seluruh pembangunan yang dijalankan tidak mengindahkan akses sosial dan walaupun ada ilmuwan sosial yang melakukan tugasnya, penelitian dan observasi atas realitas sosial hanya berlaku bagi kepentingan penguasa. Metodologi yang digunakanpun sangat konvensional dalam melakukan penelitian, dimana nantinya berguna untuk membangun konstruksi wacana pembangunan yang juga berekses pembentukan rekayasa sosial. Tentu saja teori yang digunakan oleh ilmuwan sosial kebanyakan, adalah teori struktural fungsionalis yang cenderung mengikuti logika politik perspektif penguasa.

Ilmu sosial yang mengembang hanya menjadi alat peredam konflik yang berkerak dan penyakit yang akut bagi negara dan bangsa Indonesia. Kaum ekonom dan sosiolog selalu beriringan pendapatnya, lebih-lebih realitas yang terlihat menyamakan opini seorang politisi dengan dua kaum akademisi di atas tetapi, bila dicermati titik tolak disiplin ilmu masing-masing yang berbeda ini tersistematis retorikanya dan searah dengan kebutuhan yang dipesan oleh para penguasa orde baru.

Bagi para ekonom, pertumbuhan ekonomi yang akan memacu kearah pembangunan nasional merupakan tujuan utamanya, oleh karena itu hal tersebut menjadi landasan atas peningkatan taraf hidup bangsa. Sebenarnya bila dicermati melalui kontekstual sejarah ditekankannya pertumbuhan ekonomi lekat sekali kaitannya dengan satu alasan politis : masalah legitimasi untuk orde baru, baik itu secara internal maupun secara eksternal atas realitas politik sebelumnya (era kepemimpinan Soekarno).

Era kepemimpinan Soekarno yang menekankan pada national character building mendapatkan delegitimasi melalui kudeta konstitusional yang dilakukan oleh penguasa orde baru, setelah tumbanganya Soekarno diisilah dengan Soeharto yang mengedepankan national building. Melalui teori tetesan kebawah (trickle down theory) kepada khalayak bangsa Indonesia dihipnotis, penumpukan kekayaan merupakan awalan dari pertumbuhan ekonomi, lalu barulah kekayaan tersebut terdistribusikan secara lebih merata.

Padahal teori tetesan kebawah hanya sebagian saja dapat menjawab permasalahan tertundanya pemenuhan kebutuhan materiil, bagi mayoritas masyarakat yang tidak mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi. Hal tersebut menjadi kekayaan wacana yang menghasilkan buih (busa detergen) saja, embrio yang tercipta adalah konflik horisontal karena yang kaya terus menjadi kaya dan yang miskin tetap menjadi miskin. Namun konflik tersebut, ditekan guna menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan nasional.

Realitas seperti itu memang membuat pergeseran dalam bentuk interaksi sosial dan formasi sosial yang erat keterkaitannya dengan kehidupan politik dan sosio-cultural yang ada. Tetapi dalam realitas ini, telah menghasilkan suatu realitas yang nyata-nyata menjadi bisa bagi bangsa Indonesia hingga sekarang ini. Realitas yang nyata itu adalah, tumbuhnya perbedaan besar antara kemiskinan absolut, bersumber pada kurangnya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realitas yang nyata lainnya adalah, kemiskinan relatif, merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan adalah harga yang harus dibayar pada satu pihak demi kemakmuran pada pihak lain. Krisis multidimensional.

Sedangkan para ilmuwan sosial, tidak langsung menaruh perhatiannya pada realitas sosial atau dapat dikatakan pada masalah pembelaan hak-hak rakyat. Namun ilmuwan sosial, yang selalu terbentur oleh realitas yang terjadi karena pembangunan nasional menjadikan para ilmuwan tersebut lebih tertarik pada perubahan-perubahan dalam kelembagaan sosial dan wawasan nilai, yang diperlukan oleh adanya perubahan tatanan keadaan semata.

Ilmuwan sosial dalam hal ini hanya dapat menguraikan bentuk kerjanya ke restrukturisasi yang merupakan reformasi sistem sosial, menunjukkan pada perubahan termaksud ditingkat masyarakat yang terdiri atas formasi bentuk-bentuk interaksi sosial baru. Disinilah bentangan aktualisasi permasalahan di atas terlihat jelas adanya dikotomis atau fragmentasi, tidak holistik, minim etika, statis atau monoton dan tidak bebas nilai, ilmuwan bersikap seperti “nabi-nabi baru” yang hanya menyiarkan wahyu semata dan tidak secara emansipatoris fungsi sosialnya. Walaupun begitu, ilmuwan sosial tetap berperan penting dalam rekayasa sosial yang dapat menyusun kembali lembaga-lembaga sosial atau dalam menawarkan reorientasi terhadap masalah-masalah budaya.

Pun keadaan ilmu sosial tidak jauh perkembangannya, setelah polemik yang sangat panjang dalam suatu prosa ilmu sosial. Ilmu sosial dapat diterangkan atau ditafsirkan sebagai disiplin ilmu yang tidak netral, teori maupun konsepsi yang ada pada posisi tertekan di era orde baru tidak sekedar memiliki kapasitas menjelaskan atau menafsirkan tetapi, juga memiliki potensi melegitimasi dan mendelegitimasi. Dengan begitu, restrukturisasi lembaga-lembaga sosial dan reorientasi nilai-nilai budaya dapat dipermudah atau dihambat oleh teori-teori ilmu sosial yang sesuai dengan kebutuhan ataupun kepentingan para ilmuwan sosial.

Para aktivis pergerakan dalam bentuk realitas sosial seperti ini lebih memainkan peranan walaupun, kadang tidak terukir dalam perubahan sejarah sosial. Dan reaktualisasi dari keadaan ilmu sosial di Indonesia khususnya, sudah kita dapatkan ilustrasinya yaitu, ilmuwan sosial pada era orde baru hanya berfungsi sebatas fungsi instrumentalis saja dan berkesan “mendukung” rezim orde baru. Menjadikan ilmu sosial tidak berkembang.

Menjadi suatu keharusan, bahwa seharusnya komunitas ilmiah dari ilmuwan sosial bukan hanya menciptakan kreatifitasnya dalam ilmunya saja yang berfungsi sosial (pemikirannya). Tetapi lebih dari itu, tempat berkumpul untuk mempertemukan manusia-manusia yang menyusun ide-ide, tempat aksi dan refleksi serta bertemu secara periodik.

Sumber bacaan :

1. Kleden, Ignas. Perkembangan Ilmu Sosial di Indonesia, Tindakan dan Refleksi Perspektif Asia Tenggara, 2000, Jakarta
2. Hasan, Abu. Pendidikan di Indonesia, Komunitas Filsafat Kebudayaan, 2000, Jakarta
3. Hasan, Abu. Pembangunan Nasional dan Demokratisasi di Indonesia, Komunitas Filsafat Kebudayaan, 2000, Jakarta
4. al-Makassary, Ridwan. Kematian Manusia Modern, UII Press, 2000, Yogyakarta

PEMIKIRAN AUGUSTO COMTE

1. Pendahuluan

Selintas apabila melihat manusia yang satu ini pastinya semua akan berpikir, apakah manusia ini gila atautkah cerdas ? Begitupun saya pada awalnya yang mencoba mempelajari sosiologi dan pemikirannya manusia yang satu ini, Auguste Comte. Seorang yang brilian, tetapi kesepian dan tragis hidupnya.

Auguste Comte yang lahir di *Montpellier, Perancis* pada *19 Januari 1798*, adalah anak seorang bangsawan yang berasal dari keluarga berdarah katolik. Namun, dipergalannya hidupnya Comte tidak menunjukkan loyalitasnya terhadap kebangsawannya juga kepada katoliknya dan hal tersebut merupakan pengaruh suasana pergolakan social, intelektual dan politik pada masanya.

Comte sebagai mahasiswa di *Ecole Polytechnique* tidak menghabiskan masa studinya setelah tahu mahasiswa yang memberikan dukungannya kepada Napoleon dipecat, Comte sendiri merupakan salah satu mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Comte memiliki prinsip dalam menjalani kehidupannya yang pada akhirnya Comte menjadi seorang profesional dan meninggalkan dunia akademisnya memberikan les ataupun bimbingan singkat pada lembaga pendidikan kecil maupun yang bentuknya privat.

Hal-hal yang sebenarnya menarik perhatiannyapun dasarnya bukanlah yang berbau matematika tetapi masalah-masalah social dan kemanusiaan. Dan, pada saat minatnya mulai berkembang tawaran kerjasama dari Saint Simon yang ingin menjadikan Comte sekretaris Simon sekaligus pembimbing karya awal Comte, Comte tidak menolaknya.

Tiada gading yang tak retak, istilah yang menyempal dalam hubungan yang beliau-beliau jalin. Akhirnya ada perpecahan juga antara kedua intelektual ini perihal karya awal Comte karena arogansi intelektual dari keduanya.

Sejak saat itulah Comte mulai menjalani kehidupan intelektualnya sendiri, menjadi seorang profesional lagi dan Comte dalam hal yang satu ini menurut pandangan Coser menjadi seorang intelektual yang termarginalkan dikalangan intelektual Perancis pada zamannya.

2. Perkembangan Masyarakat

Kehidupan terus bergulir Comte mulai melalui kehidupannya dengan menjadi dosen penguji, pembimbing dan mengajar mahasiswa secara privat. Walaupun begitu, penghasilannya tetap tidak mencukupi kebutuhannya dan mengenai karya awal yang dikerjakannya mandek. Mengalami fluktuasi dalam penyelesaiannya dikarenakan intensitas Comte dalam pengerjaannya berkurang drastic.

Comte dalam kegelisahannya yang baru mencapai titik rawan makin merasa tertekan dan hal tersebut menjadikan psikologisnya terganggu, dengan sifat dasarnya adalah , seorang pemberontak akibatnya Comte mengalami gejala paranoid yang hebat. Keadaan itu menambah mengembangnya sikap pemberang yang telah ada, tidak jarang pula perdebatan yang dimulai Comte mengenai apapun diakhiri dengan perkelahian.

Kegilaan atau kerajingan yang diderita Comte membuat Comte menjadi nekat dan sempat menceburkan dirinya ke sungai. Datanglah penyelamat kehidupan Comte yang bernama Caroline Massin, seorang pekerja seks yang sempat dinikahi oleh Comte ditahun 1825. Caroline dengan tanpa pamrih merawat Comte seperti bayi, bukan hanya terbebani secara material saja tetapi juga beban emosional dalam merawat Comte karena tidak ada perubahan perlakuan dari Comte untuk Caroline dan hal tersebut mengakibatkan Caroline memutuskan pergi meninggalkan Comte. Comte kembali dalam kegilaannya lagi dan sengsara.

Comte menganggap pernikahannya dengan Caroline merupakan kesalahan terbesar, berlanjutnya kehidupan Comte yang mulai memiliki kestabilan emosi ditahun 1830 tulisannya mengenai "*Filsafat Positiv*" (*Cours de Philosophie Positiv*) terbit sebagai jilid pertama, terbitan jilid yang lainnya bertebaran hingga tahun 1842.

Mulailah dapat disaksikan sekarang bintang keberuntungan Comte sebagai salah satu manusia yang tercatat dalam narasi besar prosa kehidupan yang penuh

misteri, pemikiran brilian Comte mulai terajut menjadi suatu aliran pemikiran yang baru dalam karya-karya filsafat yang tumbuh lebih dulu. Comte dengan kesadaran penuh bahwa akal budi manusia terbatas, mencoba mengatasi dengan membentuk ilmu pengetahuan yang berasumsi dasar pada persepsi dan penyelidikan ilmiah. Tiga hal ini dapat menjadi ciri pengetahuan seperti apa yang sedang Comte bangun, yaitu: 1. *Membenarkan dan menerima gejala empiris sebagai kenyataan*, 2. *Mengumpulkan dan mengklasifikasikan gejala itu menurut hukum yang menguasai mereka*, dan 3. *Memprediksikan fenomena-fenomena yang akan datang berdasarkan hukum-hukum itu dan mengambil tindakan yang dirasa bermanfaat*.

Keyakinan dalam pengembangan yang dinamakannya positivisme semakin besar volumenya, positivisme sendiri adalah paham filsafat, yang cenderung untuk membatasi pengetahuan benar manusia kepada hal-hal yang dapat diperoleh dengan memakai metoda ilmu pengetahuan. Disini Comte berusaha pengembangan kehidupan manusia dengan menciptakan sejarah baru, merubah pemikiran-pemikiran yang sudah membudaya, tumbuh dan berkembang pada masa sebelum Comte hadir. Comte mencoba dengan keahlian berpikirnya untuk mendekonstruksi pemikiran yang sifatnya abstrak (*teologis*) maupun pemikiran yang pada penjelasan-penjelasaannya spekulatif (*metafisika*).

Comte bukan hanya melakukan penelitian-penelitian atas penjelasan-penjelasan yang perlu dirombak karena tidak sesuai dengan kaidah keilmiahan Comte tetapi layaknya filsuf lainnya, Comte selalu melakukan kontemplasi juga guna mendapatkan argumentasi-argumentasi yang menurutnya ilmiah. Dan, dari sini Comte mulai mengeluarkan agitasinya tentang ilmu pengetahuan positif pada saat berdiskusi dengan kaum intelektual lainnya sekaligus

Uji coba argumentasi atas mazhab yang sedang dikumandangkannya dengan gencar. Positivisme. Comte sendiri menciptakan kaidah ilmu pengetahuan baru ini bersandarkan pada teori-teori yang dikembangkan oleh *Condorcet, De Bonald, Rousseau dan Plato*, Comte memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan yang lebih dulu timbul. Pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya bukan hanya berguna, tetapi merupakan suatu keharusan untuk diterima karena ilmu

pengetahuan kekinian selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan sebelumnya dalam sistem klasifikasinya.

Asumsi-asumsi ilmu pengetahuan positif itu sendiri, antara lain : Pertama, ilmu pengetahuan harus bersifat obyektif (bebas nilai dan netral) seorang ilmuwan tidak boleh dipengaruhi oleh emosionalitasnya dalam melakukan observasi terhadap obyek yang sedang diteliti. Kedua, ilmu pengetahuan hanya berurusan dengan hal-hal yang berulang kali. Ketiga, ilmu pengetahuan menyoroti tentang fenomena atau kejadian alam dari mutualisma simbiosis dan antar relasinya dengan fenomena yang lain.

Bentangan aktualisasi dari pemikiran Comte, adalah dikeluarkannya pemikirannya mengenai "*hukum tiga tahap*" atau dikenal juga dengan "*hukum tiga stadia*". Hukum tiga tahap ini menceritakan perihwal sejarah manusia dan pemikirannya sebagai analisa dari observasi-observasi yang dilakukan oleh Comte.

Versi Comte tentang perkembangan manusia dan pemikirannya, berawal pada *tahapan teologis* dimana studi kasusnya pada masyarakat primitif yang masih hidupnya menjadi obyek bagi alam, belum memiliki hasrat atau mental untuk menguasai (pengelola) alam atau dapat dikatakan belum menjadi subyek. Fetitisme dan animisme merupakan keyakinan awal yang membentuk pola pikir manusia lalu beranjak kepada politeisme, manusia menganggap ada roh-roh dalam setiap benda pengatur kehidupan dan dewa-dewa yang mengatur kehendak manusia dalam tiap aktivitasnya dikeseharian. Contoh yang lebih konkritnya, yaitu dewa Thor saat membenturkan godamnyalah yang membuat guntur terlihat atau dewi Sri adalah dewi kesuburan yang menetap di tiap sawah. Beralih pada pemikiran selanjutnya, yaitu *tahap metafisika* atau nama lainnya *tahap transisi* dari buah pikir Comte karena tahapan ini menurut Comte hanya modifikasi dari tahapan sebelumnya. Penekanannya pada tahap ini, yaitu monoteisme yang dapat menerangkan gejala-gejala alam dengan jawaban-jawaban yang spekulatif, bukan dari analisa empirik. "Ini hari sialku, memang sudah takdir !", "penyakit AIDS adalah penyakit kutukan!", dan lain sebagainya, merupakan contoh dari metafisika yang masih ditemukan setiap hari. *Tahap positif*, adalah tahapan yang terakhir dari pemikiran manusia dan perkembangannya, pada tahap ini gejala alam diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukum-hukumnya yang dapat ditinjau, diuji dan dibuktikan atas cara

empiris. Penerangan ini menghasilkan pengetahuan yang instrumental, contohnya, adalah bilamana kita memperhatikan kuburan manusia yang sudah mati pada malam hari selalu mengeluarkan asap (kabut), dan ini karena adanya perpaduan antara hawa dingin malam hari dengan nitrogen dari kandungan tanah dan serangga yang melakukan aktivitas kimiawi menguraikan sulfur pada tulang belulang manusia, akhirnya menghasilkan panas lalu mengeluarkan asap.

Comte jelaslah dapat terlihat progresivitasnya dalam memperjuangkan optimisme dari pergolakan realitas sosial pada masanya, dengan ilmu sosial yang sistematis dan analitis. Comte diklanjutan sistematisasi dari observasi dan analisisnya, Comte menjadikan ilmu pengetahuan yang dikajinya ini terklasifikasi atas dua bagian, yaitu: sosial statik dan sosial dinamik.

Sosial statik dan sosial dinamik hanya untuk memudahkan analitik saja terbagi dua, walaupun begitu keduanya bagian yang integral karena Comte jelas sekali dengan hukum tiga tahapnya memperlihatkan ilmu pengetahuan yang holistik. Statika sosial menerangkan perihal nilai-nilai yang melandasi masyarakat dalam perubahannya, selalu membutuhkan sosial order karenanya dibutuhkan nilai yang disepakati bersama dan berdiri atas keinginan bersama, dapat dinamakan hukum atau kemauan yang berlaku umum. Sedangkan sosial dinamik, ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perkembangan masyarakat atau gerak sejarah masyarakat kepada arah kemajuannya.

Pemandangan Comte rasanya dapat terlihat dalam penjabarannya mengenai ilmu pengetahuannya, yang mengidamkan adanya tata yang jelas mengedepankan keteraturan sosial dan kemajuan perkembangan serta pemikiran masyarakat ke arah positif. Sebagai seorang ilmuwan Comte mengharapkan sesuatu yang ideal tetapi, dalam hal ini Comte berbenturan dengan realitas sosial yang menginginkan perubahan sosial secara cepat, revolusi sosial.

Comte terpaksa memberikan stigma negatif terhadap konflik, letupan-letupan yang mengembang melalui konflik dalam masyarakat karena akan menyebabkan tidak tumbuhnya keteraturan sosial yang nantinya mempersulit perkembangan masyarakat. Ketertiban harus diutamakan apabila masyarakat menginginkan kemajuan yang merata dan bebas dari anarkisme sosial, anarkisme intelektual. Keteraturan sosial tiap fase

perkembangan sosial (sejarah manusia) harus sesuai perkembangan pemikiran manusia dan pada tiap proses fase-fasenya (perkembangan) bersifat mutlak dan universal, merupakan inti ajaran Comte.

Comte memainkan peran ganda pada pementasan teater dalam hidupnya, pertama-tama Comte yang menggebu dalam menyelamatkan umat manusia dari “kebodohan”, menginginkan adanya radikalisme perkembangan pemikiran dengan wacana positivisme dan progresif dalam tata masyarakat. Kedua, Comte menolak keras bentuk anarkisme sosial yang merusak moral dan intelektual.

Comte adalah seorang yang radikal tetapi, bukanlah seorang yang revolusioner, Comte seorang yang progresif namun bukan seorang yang militansinya tinggi (walaupun, sempat mengalami kegilaan/paranoid). Comte berjalan di tengah-tengah, mencari jalan alternatif melalui ilmu pengetahuan yang dikembangkannya guna menyiasati kemungkinan besar yang akan terjadi.

3. Pluralitas Ekstrim

Follow up atas radikalisme Comte, antara progresivitas untuk menciptakan perubahan sosial dengan penjagaan atas keteraturan sosial menjadi bahan kontemplasi dan observasinya. Comte sangat berjuang keras dengan idealismenya (positivisme) agar tercapai dan dapat mengatasi keguncangan akibat kecemburuannya, harapan dan kenyataan yang mungkin tidak akan sama nantinya yang akan terjadi pada manusia.

Pada saat tertentu Comte ulas balik kembali untuk mencari sumbangan sosial para intelektual sebelum Comte, dan terdapat oleh Comte tentang konsensus intelektual. Konsensus intelektual selalu menjadi dasar bagi tumbuhnya solidaritas dalam masyarakat. Dan nilai tersebut, diadopsi dari khasniah masyarakat teologis oleh Comte. Comte melihat agama memiliki ikatan emosional yang tinggi berdasarkan sistem kepercayaan yang satu dan itu mendorong kebersamaan umat manusia menjalankan ritual keagamaan dengan penuh disiplin, menuju hal yang bernuansa transendental dengan mengutamakan solidaritas sosial dan konsensus.

Menurut Comte hal ini tepat bila akan digunakan sebagai satu formulasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, perubahan secara cepat atau

revolusi sosial. Namun Comte, tidaklah dapat mengandalkan agama yang konvensional apabila ingin mengadakan sinkronisasi dan konsisten dalam pengembangan ilmu pengetahuannya, positivisme.

Rutinitas Comte yang sangat ajek ternyata tidak mengaburkan Comte dari sense of romance-nya, Comte bertemu seorang perempuan yang bernama Clotilde de Vaux di tahun 1844. Walaupun, Comte sangat mencintainya hingga akhir hayat Clotilde tidak pernah menerima cinta Comte karena sudah memiliki suami, walau suaminya jauh dari Clotilde. Comte hanya sempat menjalankan hubungan yang platonis, 1845 Comte menyampaikan hasratnya dan hal tersebut tahun yang fantastis bagi Comte. Clotilde de Vaux meninggal pada tahun 1846 karena penyakit yang menyebabkan tipis harapan sembuhnya dan Clotilde masih terpisah dengan suaminya.

Pada saat itulah mungkin Comte mulai memikirkan perihal keluarga, keluarga dianggap kesatuan organis yang dapat menyusun pemikiran-pemikiran sedari awal bagi manusia-manusia baru (pasangan suami-istri). Internalisasi nilai-nilai baru, tentunya yang positif. Comte yang percaya bahwa perubahan tidaklah akan begitu tiba-tiba datangnya dalam masyarakat. Comtepun percaya akan humanitas keseluruhan dapat tercipta dengan kesatuan lingkungan social yang terkecil, yaitu keluarga. Keluarga-keluarga merupakan satuan masyarakat yang asasi bagi Comte. Keluarga yang mengenalkan pada lingkungan social, eskalasi keakraban yang meninggi akan menyatukan dan mempererat keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

Hal tersebut membentuk pengalaman yang didominasi oleh altruisma, terarah atas ketaatan, kerjasama dan keinginan untuk mempertahankan yang telah dicapai dalam perspektif keluarga bentuk mikrokosmik. Dalam diri manusia memiliki kecendrungan terhadap dua hal, yaitu *egoisme dan altruisma (sifat peribadi yang didasarkan pada kepentingan bersama)*. Kecendrungan pertama terus melemah secara bertahap, sedang yang kedua makin bertambah kuat. Sehingga manusia makin memiliki sosialitas yang beradab, akibat bekerja bersama sesuai pembagian kerja berdasarkan pengalaman adanya pertautan kekeluargaan yang mengembang. Tidak dapat dikatakan tidak ini juga karena adanya sosialisasi keluarga terhadap keluarga lainnya.

Rupa-rupanya Comte menganggap keluarga yang menjadi sumber keteraturan social, dimana nilai-nilai cultural pada keluarga (kepatuhan) yang disinkronisasikan dengan pembagian kerja akan selalu mendapat tuntutan kerja sama. Tuntutan kerjasama berarti saling menguntungkan, menumbuhkan persamaan dalam mencapai suatu kebutuhan.

Seiring dengan kontemplasi dan observasi Comte dalam mencari jalan tengah serta persentuhannya dengan romantisme platonis, perang terus menerus dan individualitas mengembang bagai jamur di musim hujan pada zaman post-revolusi Perancis semakin menentukan arah pemikiran Comte yang empirik itu.

Pendobrakan besar-besaran dilakukan Comte terhadap realitas sosial yang terus mencoba menghegemoni umat manusia pada zamannya melalui institusi gereja, hal yang kudus dan ketabuan yang dibuat oleh manusia (khususnya, pastur/pendeta/pemuka agama) mendapatkan kritik keras karena menjajakan doktrin, dogma dan melakukan pembodohan yang berakibat, yang kaya tetap kaya lalu yang miskin akan tetap miskin.

Dalam pada itu Comte yang telah meyakini ilmu pengetahuan yang ditebarkannya mencoba mensinkronisasikan altruisma unsur kebudayaan teologis, dimana konsensus sosial dan disiplin merupakan landasannya atas aktivitas sehari-hari umat manusia. Begitupun kesatuan organis terkecil di masyarakat, amat mempengaruhi Comte sebagai institusi yang dapat meradiasi pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam pembentukan sosial orde pada masyarakat luas. Comte mulai merilis suatu pola dan bentuk penyebaran dari satu sosial orde yang sangat mempengaruhi umat manusia, Comte menciptakan agama baru yang sesuai dengan idealismenya.

Idealisasinya berbentuk agama yang dapat dikatakan sekuler dan lengkap bersama ritus, hari rayanya, pemuka agama serta lambangnya, dilengkapi oleh Comte. Agama gaya baru ini dinamakan agama humanitas, dimaksudkan untuk memberikan cinta yang lebih terhadap manusia-manusia yang menghasilkan karya dalam sejarah perkembangan manusia. Menurut Comte mencintai kemanusiaan, inilah yang menyebabkan lahirnya keseimbangan dan keintegrasian baik dalam pribadi individu maupun dalam masyarakat. Kemanusiaanlah yang kudus dan sakral, bukanlah Allah

karena banyak penjelasan dalam agama konvensional yang bersifat abstrak dan spekulatif, hanya memberi impian. Institusi agamapun hanya menjadi alat propaganda kepentingan politik dari kekuatan politik tertentu.

Comte menciptakan agama tersebut, terlihat seakan mengalami romantisisme terhadap pengalamannya yang lalu bersama Clotilde de Vaux dan menghasilkan hubungan yang berbuih saja dan realitas sosial yang juga turut membentuknya. Dari sini pada saat Comte, membentuk ceremonial keagamaannya dengan mengadakan penyembahan terhadap diri perempuan, Comte dikatakan oleh para intelektual lainnya kehilangan konsistensi terhadap ilmu pengetahuan yang dikembangkannya karena pemikirannya sudah terbungkus dengan perasaan. Comte dikatakan tidak ilmiah.

Namun permasalahan pemujaan Comte, terhadap perempuan diadopsi dari rentang sejarah cerita bunda Maria, bukan karena adanya penolakan perasaan cintanya dari Clotilde de Vaux. Dalam hal ini Comte dapat juga dikatakan mengadakan sublimasi terhadap obsesinya, yaitu kebebasan berpikirnya atas idealismenya agar dapat menyasati secara strategis. Menciptakan masyarakat positivis di masa depan, dalam kontekstual hubungan seks antara pria dan perempuan tidak perlu ada lagi dan *“kelahiran manusia-manusia baru akan keluar dengan sendirinya dari kaum perempuan”*. Di era sekarang hal tersebut merupakan pandangan umum, perkembangan reproduksi melalui teknologi kedokteran telah berhasil mengaktualisasikan ide tersebut.

Comte bersama ahli-ahli bidang lainnya yang sepakat dengan pemikirannya menjadi perangkat institusi keagamaan yang dibuatnya dan mulai mensosialisasikan kepada kalangan elit-elit politik, Comte mengarang buku kembali dan diberikan judul *Positivist Catechism* dan *Appeal to Conservatives*.

Comte dengan konsistensinya mensosialisasikan agama humanitas-nya dan hukum tiga tahap yang memaparkan perkembangan kebudayaan manusia hingga akhir hayatnya, Comte meninggal di *Paris* pada tanggal *5 September 1857*.

4. Kesimpulan

Auguste Comte adalah, manusia yang berjalan di tengah-tengah antara ideologi yang berkembang (*progressiv vs konservatif*), berada pada ruang abu-abu (keilmiahan ilmu pengetahuan). Comte memberikan sumbangsih cukup besar untuk manusia walaupun, ilmu pengetahuan yang dibangun merupakan ide generatif dan ide produktifnya. Comte turut mengembangkan kebudayaan dan menuliskan : ***“Sebagai anak kita menjadi seorang teolog, sebagai remaja kita menjadi ahli metafisika dan sebagai manusia dewasa kita menjadi ahli ilmu alam”***.

Penegakan Disiplin Siswa dan Realitas Sosial

JC Tukiman Taruna

PERBINCANGAN tentang mutu pendidikan di kalangan masyarakat sering mengerucut menjadi semacam "tesis" yang menyebutkan "semakin baik disiplin siswa ditegakkan di sebuah sekolah, semakin bermutulah sekolah itu". Selanjutnya, perbincangan seru menyebutkan contoh-contoh, misalnya sekolah yang sebagian (besar?) siswanya suka tawuran pastilah sekolah itu tidak bermutu karena kedisiplinan siswa tidak ditegakkan di sekolah itu.

PERCAKAPAN umum dapat berlanjut: "Lihatlah siswa yang banyak berulah atau nongkrong di gang-gang jalan, dalam bus umum, di kereta api, di mal, gedung bioskop, dan sebagainya. hampir dapat dipastikan mereka datang dari sekolah yang kurang bermutu. Mengapa? Karena tidak ada disiplin di sekolah itu."

Namun, pada sisi lain, sekadar contoh, Fitang Budi Aditya, mantan murid SMP Negeri 3 Babelan, Kabupaten Bekasi, yang trauma di-"disiplin"-kan teman-temannya belum mendapatkan sekolah baru, sedangkan ibu guru Nina telah dimutasi (Kompas, 31 Agustus 2004).

Kebijakan pendidikan

Kajian kebijakan pendidikan secara garis besar umumnya difokuskan ke tiga komponen utama, yakni (a) pemerataan, (b) efisiensi, dan (c) mutu. Pemerataan secara umum dimaknai sebagai kesempatan memperoleh pendidikan, yang diukur melalui persamaan kesempatan, yaitu sejauh mana akses terhadap pendidikan telah merata; dan keadilan kesempatan yang mengukur apakah kesempatan memperoleh pendidikan telah sama dinikmati oleh berbagai kelompok yang berhak.

Efisiensi pendidikan sering dibedakan antara efisiensi internal, yakni perbandingan input dan hasil jangka pendek sebagaimana tampak pada angka kenaikan kelas, angka putus sekolah, angka mengulang kelas, dan angka kelulusan. Adapun efisiensi eksternal yang dihitung dengan menggunakan input dan hasil jangka panjang, seperti lulusan yang melanjutkan (angka transisi), dan lulusan yang bekerja. Dari figurasi angka-angka itu akan tampak seberapa efisien pendidikan itu dilaksanakan.

Ada banyak batasan mengenai mutu pendidikan, seperti "pendidikan dapat dinyatakan (telah) bermutu apabila seluruh siswa yang mengikuti suatu satuan program pendidikan pada jenis dan jenjang tertentu sudah mencapai standar yang telah ditetapkan (bold oleh penulis) untuk satuan program tersebut" (Umar, 1993). Indikator mutu pendidikan, selanjutnya, ditekankan pada nilai, entah itu nilai-nilai ulangan, tes, ujian, dan sebagainya, sehingga semakin tinggi (baik) perolehan nilai-nilai para siswa suatu sekolah semakin dianggap bermutulah sekolah itu. Pertanyaannya, seperti awal tulisan ini telah menyebutkan, mengapa mutu pendidikan dikaitkan dengan penegakan disiplin? Benarkah penegakan disiplin siswa akan mendongkrak peningkatan mutu pendidikan? Siapa harus menegakkan disiplin siswa? Dalam kasus ibu guru Nina yang dikenai sanksi mutasi jelas membuktikan betapa kepala sekolah bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab terhadap upaya penegakan disiplin siswa.

Disiplin = bermutu?

Pemaknaan terhadap disiplin sering kali terbatas pada empat alur pikir berikut: upacara, ketaatan, sanksi, dan permodelan. Segala macam upacara, termasuk di dalamnya apel, dipandang sebagai prasyarat utama penegakan disiplin. Karena itu, upacara menjadi sangat penting sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang ketika/dalam upacara dianggap sebagai pelanggaran fatal/berat. Ukuran ketaatan seorang murid ada di sana, dan barangsiapa melanggar, sanksi akan menyertainya. Di banyak sekolah, alur pikir seperti itu menciptakan permodelan. Artinya, pola atau upaya penegakan disiplin seperti itulah yang dianggap paling baik.

Apa yang sebenarnya terjadi dalam pemaknaan seperti itu? Penegakan disiplin siswa dilakukan oleh banyak sekolah dengan cara "di luar kelas", padahal yang justru penting adalah penegakan disiplin pembelajaran dalam kelas. Maksudnya, model penegakan disiplin siswa hanya dengan menekankan pada ketepatan waktu, ketaatan, dan serta-merta dikenai sanksi bagi yang melanggar adalah upaya yang melulu "mengharuskan dari luar" sehingga siswa adalah obyek dan guru atau pihak sekolah sebagai subyek yang tidak dapat salah. Penegakan disiplin siswa dapat terjadi secara optimal apabila pihak sekolah dan para guru melakukan perbaikan pembelajaran yang menjadi siswa sebagai sesama subyek bagi guru.

Menarik konsep Paulo Freire (dalam buku Sekolah, Kapitalisme yang Licik, 1998), disebutkan di sana bahwa pembelajaran adalah menguras rasa ingin tahu siswa. Kalau guru selama bersama-sama murid terus berusaha menguras rasa ingin tahu siswa, niscaya tidak akan ada satu murid pun yang terlambat, membolos, atau ogah-ogahan dan dari sanalah mutu pendidikan pasti akan meningkat. Alhasil, tidak ada satu siswa pun yang

tidak disiplin. Jadi, disiplin itu buah dari pembelajaran, bukan prasyarat untuk pembelajaran; sejauh pembelajaran itu bermutu karena rasa ingin tahu siswa untuk membangun makna terpenuhi tuntas, sejauh itu dapat dipastikan disiplin siswa meningkat tajam.

Secara lebih substansial kita dapat bertanya-tanya: "Siapa sebenarnya dewasa ini yang masih peduli terhadap penegakan disiplin?" Juntrung pertanyaan itu ialah, realitas sosial membuktikan tidak relevan lagi yang namanya disiplin itu.

Siswa sekolah banyak yang terlambat karena pelayanan kendaraan umum yang dipergunakannya sehari-hari tidak peduli lagi terhadap jam berapa siswa masuk kelas, dan sebagainya. Dalam skala lebih kecil lagi, banyak orangtua siswa tidak peduli lagi untuk membantu anak-anaknya berdisiplin; tahu kalau perjalanan ke sekolah tidak kurang dari 45 menit, dan akan lebih lama lagi karena kemacetan di mana-mana, tidak semua orangtua telah siap mendukung anak-anaknya sejak pukul lima pagi.

Realitas sosial yang beranggapan bahwa disiplin hanya untuk upacara saja, dan tidak penting untuk kehidupan sehari-hari, memang telah mencoreng-moreng pemaknaan atas disiplin itu sendiri. Orang secara sendiri-sendiri memaknai disiplin sesuai dengan cita rasa dirinya sendiri. Bagi yang cita rasanya mengatakan mengantre itu baik, ia masih akan bertindak mengantre setiap kali dalam kerumunan massa; sebaliknya jangan berharap sedikit pun bagi orang yang secara individual sudah kehilangan cita rasa pribadinya.

Penegakan disiplin siswa adalah pendidikan nilai dan cita rasa. Karena itu harus dari dalam, yaitu dari proses pembelajaran guru, namun menjadi semakin sulit karena realitas sosial tidak mendukungnya. Jangan "jatuh korban" lagi hanya gara-gara pemaknaan penegakan disiplin yang kurang tepat.

JC Tukiman Taruna *Pengembang Masyarakat, Praktisi Manajemen Berbasis Sekolah, Tinggal di Ungaran, Jawa Tengah*

Penghancuran peninggalan sejarah berupa bangunan tua menunjukkan gambaran keprihatinan kegiatan konservasi. Bukan sekadar uang dan pengetahuan, namun dedikasi dan keinginan yang kuat juga menentukan (Kompas, 7 Januari 2001 dan 16 Maret 2001). Ketidakpastian reformasi politik dan krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan merupakan saat tepat untuk mengkaji kembali hakikat pemugaran dalam perencanaan dan perancangan kota di Indonesia, sebagai bagian dari usaha pembentukan identitas bangsa.

Sebenarnya sejak tahun 1931, Indonesia, waktu itu Hindia Belanda, telah memiliki Monumenten Ordonantie Nr. 238, yaitu peraturan perlindungan terhadap bangunan lama/bersejarah. Pada tahun 1992, perangkat hukum tersebut direvisi menjadi UU Cagar Budaya Nomor 5/1992. Tetapi, keberadaan UU ini belum menjamin bahwa kegiatan pelestarian dan pemugaran di kota-kota Indonesia berlangsung baik, karena petunjuk pelaksanaan teknis maupun dukungan kebijaksanaan masih dalam proses penggarapan.

Lemahnya penerapan aspek legal dan kurangnya pemahaman mengakibatkan tidak sedikit bangunan tua bersejarah dikorbankan demi pembangunan baru (modernisasi). Di sinilah terjadi konflik kepentingan antara pro dan kontra kegiatan pelestarian/pemugaran. Situasi ini masih diperburuk dengan kurangnya partisipasi dan motivasi masyarakat dalam proses pembentukan lingkungan. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah sejauh mana kaitan kegiatan konservasi dengan realitas sosial di Indonesia ?

DALAM era pertumbuhan ekonomi, modernisasi fisik menjadi usaha penyeteraan. Semangat pembebasan dan apa yang disebut *minderwertigkeitskomplexe* melatarbelakangi proses tersebut. Pada sisi lain, orientasi terhadap tuntutan ekonomi tidak hanya menyebabkan de-orientasi pembangunan fisik, tetapi juga penolakan terhadap konsep serta produk seni bangunan dan seni binakota yang telah terbina, termasuk warisan sejarah dari zaman kolonial.

Dalam kegiatan konservasi sendiri masih terdapat permasalahan mendasar tentang pengertian monumen dan warisan sejarah. Monumen secara terbatas diartikan hanya pada bangunan monumental, candi, tugu ataupun prasasti. Kecuali keraton, istana dan bangunan religius, peninggalan sejarah lainnya yang tidak tergolong dalam kategori *grand architecture*-sebenarnya juga produk budaya-belum dapat diterima. Dalam diskusi warisan sejarah, pempunan pengkajian masih terbatas pada warisan budaya dalam bentuk kesenian tradisional, kaligrafi, seni kriya, seni lukis tradisional, dan bahasa daerah/dialek. Sedangkan apresiasi terhadap artefak sejarah dalam konteks seni bangunan maupun kawasan kota sangat terbatas.

Secara empiris, kegiatan konservasi di kebanyakan negara Dunia Ketiga dipelopori dan dilakukan ahli-ahli asing atau sebagian kecil masyarakat berkecukupan yang sempat memperoleh pendidikan langsung/tidak langsung dari Barat (lihat kasus Gedung Arsip Nasional). Meskipun golongan masyarakat ini semakin hari jumlahnya meningkat, tetapi bukan jaminan penyebaran apresiasi terhadap warisan budaya berjalan lancar. Terlebih lagi kegiatan pembangunan fisik perkotaan di Indonesia masih berada pada sekelompok masyarakat tertentu dan bagi mereka bahkan menjadi semacam komoditi. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya diskrepansi di dalam struktur masyarakat yang tercermin juga pada sektor pembangunan fisik. Jadi, jelaslah mengapa kegiatan pelestarian dengan segala aspek kulturalnya masih bersifat elitis dan belum memasyarakat.

Realitas sosial seni bangunan Indonesia saat ini berada dalam konteks pembangunan masyarakat industrial baru (era informasi). Hal ini ditandai dengan adanya perubahan mencolok dari masyarakat feodal-agraris menuju masyarakat demokratis-industrial. Struktur sosial budaya yang membentuk nilai dan batasan perancangan arsitekturalnya

pun juga masih samar. Di satu pihak, kekaburan ini tidak lepas dari proses modernisasi sikap hidup dan di lain pihak berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung pesat namun hanya dinikmati oleh lapisan masyarakat tertentu. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial maupun pendapatan yang terus melebar karena struktur pemerataannya tidak dan belum sempat terbangun. Tidak mengherankan apabila pembangunan kelembagaan pun lebih lambat dari pembangunan fisik arsitekturalnya. Adanya diskrepansi dalam struktur masyarakat secara tidak langsung juga menyebabkan sulitnya mengungkapkan apresiasi terhadap warisan budaya umumnya dan terhadap karya seni bangunan/seni binakota khususnya. Hal ini terjadi karena realitas sosial yang mendukung nilai seni bangunan menjadi fragmen yang tidak mudah dikaitkan satu sama lain secara arsitektural.

SEJAK dua dasawarsa terakhir dimulai diskusi pencarian jati diri arsitektur Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini sudah sewajarnya bila posisi seni bangunan maupun seni binakota saat ini di Indonesia secara moral dituntut membentuk lingkungan hidup yang bercirikan nuansa regional secara kultural. Hal ini sekaligus diharapkan juga mampu menjembatani kesenjangan antara sektor informal dan formal yang merupakan fenomena realitas seni bangunan.

Karakteristik permasalahan seni bangunan ini tidak bertumpu saja pada pencarian “gaya arsitektural” tetapi juga pada pengungkapan kembali konsep arsitektural yang telah ada sebelumnya; khususnya dari khasanah arsitektur tradisional dan kolonial.

Atas dasar pemikiran inilah maka pertimbangan kritis terhadap warisan budaya, khususnya arsitektur tradisional dan kolonial, menjadi sentral. Diperlukan usaha kreatif dalam melestarikan warisan budaya urban tersebut. Nuansa pendidikan dalam mengapresiasi konsep lama dan menginovasi sejarah sebagai acuan untuk mengembangkan konsep baru menjadi hal yang tak terelakkan, seperti dituturkan arsitek Richard Rogers (1988)...In all fields, not least in architecture, it is generally accepted that to learn from the past is the way forward and that history is a prime generator. Proses ini pada hakikatnya merupakan semangat dari konservasi.

Dalam konsep pengungkapan kembali bangunan bersejarah perlu adanya suatu manfaat yang jelas bagi komunitas untuk masa kini dan masa depan. Konservasi harus mampu mengantisipasi dan menjawab permasalahan lingkungan, sehingga kegiatan konservasi bukan hanya untuk mengenang dan membekukan masa lalu.

Sentimental budaya harus dihilangkan karena sebagian dari masa lalu bukan untuk menjadi kenangan, melainkan untuk dijadikan pertimbangan bagi konsep pengembangan lingkungan hidup. Dengan demikian, hakikat dan salah satu tujuan penting konservasi bangunan dan kawasan bersejarah adalah untuk proses belajar dan pengembangan komunitas per se.

Melalui penafsiran sejarah dan apresiasi kritis terhadap warisan budaya urban ini diharapkan komunitas semakin mampu menghargai eksistensi warisan budaya. Dengan

penulisan sejarah tentang bangunan dan kawasan lama pula, maka proses apresiasi ini bisa berlangsung.

Realitas sekarang menunjukkan, kegiatan konservasi masih berada pada posisi marginal. Meski demikian adalah tanggung jawab bersama untuk menginformasikan dan menyosialisasikan kegiatan konservasi dengan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat ikut mengartikulasikan permasalahan lingkungan. Partisipasi mengindikasikan suatu bentuk proses perencanaan dan perancangan demokratis. Dengan demikian masyarakat tidak saja diberi kesempatan aktif mengenal, belajar dari lingkungannya, tetapi juga ikut bertanggung jawab.

Akan tetapi, mengingat realitas sosial masyarakat Indonesia, implementasi proses perencanaan dan perancangan masih memerlukan fungsi keperantaraan yang tidak sekadar memberi bantuan teknis, tetapi juga memberi dukungan dan bantuan moral

kepada masyarakat serta melindungi hak dan kepentingan mereka. Jadi, fungsi keperantaraan ini diharapkan menjembatani berbagai kepentingan dari para pemangku dalam kegiatan pelestarian/pembangunan, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah.

Seandainya pembentukan identitas nasional diyakini dapat diraih melalui pelestarian kekayaan warisan budaya, maka pembangunan lingkungan binaan seharusnya berangkat dari kenyataan yang ada. Proses pemahaman warisan budaya dan apresiasi makna sejarah didalamnya memerlukan waktu, karena keduanya juga bagian dari proses kebudayaan suatu komunitas. Pada akhirnya, konservasi memang merupakan kinerja budaya!

Center for Population and Policy Studies

Gadjah Mada University

S. 311, May 23, 2002 1

**Perluasan Kota dalam Realitas Sosial
dan Kultural Masyarakat**

T.Yoyok Wahyu Subroto1

Abstrak

Tingginya kecenderungan perluasan kota merupakan isu menarik apalagi jika dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan ruang hunian (*living space*) penduduk kota di desa-desa pinggiran kota dan kepentingan konservasi lahan-lahan produktif di desa-desa pinggiran kota tersebut. Proses perluasan kota ini telah memberikan dampak pada perubahan desa-desa yang berbatasan langsung dengan kota yang tidak hanya secara fisik keruangan namun juga secara sosial dan kultural. Metoda pendekatan pengembangan pola keruangan wilayah menjadi penting untuk dikedepankan untuk memberikan arah dalam

merumuskan konsideran sosiologis dan keruangan guna mengarahkan sasaran pengembangannya agar proses perubahan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan arah dan tahapan yang benar. Pengembangan dan perluasan kota dapat direncanakan melalui 5 identifikasi meliputi (1) tujuan; (2) pola pengembangan dan pelestarian; (3) fokus wilayah; (4) perencanaan dan (5) implementasi. Kelima identifikasi tersebut diarahkan agar pola perluasan kota dapat terkendali yang dikenal dengan istilah akresi (*accretion expansion*).

Pendahuluan

Salah satu pendorong tingginya mobilitas penduduk desa ke kota dalam skala besar (*massive urbanization*) adalah adanya kenyataan bahwa kota memiliki daya tarik (*pull factor*) kuat secara ekonomi. Pada banyak kasus kaum migran yang datang ke kota sering tidak memiliki kesiapan untuk hidup di kota baik karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan maupun tidak adanya tempat tinggal permanen yang mampu mendukung eksistensi mereka di kota. Kondisi ini merupakan salah satu faktor yang telah mempercepat laju proses taudifikasi atau penurunan kualitas (*deterioration process*) baik pada kondisi fisik keruangan dan kondisi sosiologis masyarakat maupun kondisi ekologis khususnya di area di mana penduduk banyak bermukim di perkotaan. Selama ini perhatian para pemerhati masalah mobilitas penduduk kebanyakan tertuju pada proses migrasi penduduk dari desa ke kota yang secara praktis cenderung memberikan kontribusi pada pemikiran alternatif solusi kasus masalah yang terjadi di perkotaan. Di pihak lain realitas di lapangan menunjukkan bahwa desa-desa yang ditinggalkan baik secara permanen maupun sementara telah meninggalkan persoalan tersendiri. Hal tersebut paling tidak jika dilihat dari semakin tidak menariknya sektor pertanian bagi para petani akibat sektor ini sampai saat ini belum banyak memberi motivasi ke arah kemakmuran di samping budidaya pertanian yang sulit menerapkan teknologi maju. Di pihak lain dari sisi pandang para konservasionis lingkungan, kondisi tersebut akan memberikan dampak cukup serius terhadap terjadinya perubahan tata guna lahan dan keseimbangan ekologis karena semakin berkurangnya penduduk yang menggarap sawahnya. Hal ini didukung oleh data statistik demografi serta prediksi BPS yang dibuat untuk satu dekade mendatang. Jika pada 1990 penduduk perdesaan di Indonesia masih berjumlah 69%, maka diperkirakan dengan laju pertumbuhan penduduk desa yang 'hanya' 1,2 persen per tahun diperkirakan pada 2010 nanti penduduk perdesaan akan menjadi 48 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu dalam kurun waktu yang sama, lahan pertanian produktif akan menyusut sekitar 2,4 juta hektar. Fenomena ini paling tidak telah menimbulkan dua ekkses dalam kehidupan masyarakat perdesaan kita dewasa ini yaitu semakin berkembangnya pekerjaan yang mengabsorpsi tenaga kerja non pertanian serta meningkatnya hedonisme masyarakat yang dicerminkan oleh

1 Ir. T. Yoyok Wahyu Subroto, M.Eng.,Ph.D., adalah dosen pada Program Pascasarjana Program Studi Teknik Arsitektur dan Magister Desain Kawasan Binaan (MDKB), Universitas Gadjah Mada
Center for Population and Policy Studies
Gadjah Mada University
S. 311, May 23, 2002 2

perilaku konsumtif terhadap produk-produk industri seiring dengan semakin banyaknya manusia yang ingin hidup dengan gaya hidup kota. Pada kondisi tersebut di atas daerah pinggiran (*urban fringe*) berpotensi menjadi daerah yang rentan terhadap dampak perubahan baik secara fisik keruangan maupun psikis sosial masyarakat akibat terjadinya penetrasi lahan kekotaan ke lahan kedesaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kekuatan yang dimiliki oleh kota dan penduduknya dalam mengubah kondisi desa-desa di pinggiran kota. Sargent (1976) dalam Yunus (2001) mengidentifikasi 5 (lima) kekuatan yang menyebabkan terjadinya pemekaran dan perubahan kota secara morfologis yaitu (1) peningkatan jumlah penduduk yang besar baik alami maupun migrasi; (2) peningkatan kesejahteraan penduduk secara ekonomi sehingga terjadi fenomena *urban outflow*, yaitu kecenderungan masyarakat kota untuk memilih tempat tinggal di pinggiran kota yang relatif memiliki kualitas lingkungan lebih baik; (3) peningkatan pelayanan transportasi karena kemajuan teknologi; (4) penurunan peranan pusat kota sebagai pusat kegiatan fungsi kekotaan dan (5) peningkatan peranan para pengembang dalam menyediakan lokasi baru permukiman dalam jumlah besar. Dalam banyak kasus kelima kekuatan tersebut di atas menyebabkan melemahnya perspektif positif terhadap eksistensi wilayah perdesaan. Kasus-kasus yang dijumpai di lapangan memperlihatkan juga bahwa perubahan desa-desa menjadi kota terjadi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Fenomena ini dapat dilihat pada kecepatan pertumbuhan kawasan-kawasan baru di pinggiran kota baik untuk fungsi permukiman, pendidikan maupun jasa di berbagai kota besar di Indonesia. Hal ini tentu mendorong munculnya reklasifikasi wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan. Sebagai contoh dialami oleh wilayah kabupaten Bantul dan Sleman yang pada satu dekade lalu telah mengalami reklasifikasi wilayah dari status wilayah perdesaan menjadi wilayah perkotaan sejalan dengan telah dipenuhinya persyaratan wilayahnya sebagai wilayah permukiman kota yang meliputi 38 ribu hektar (BPS-DIY, 1984). Kenyataan ini menunjukkan besarnya tantangan wilayah perdesaan di Indonesia dalam mempertahankan karakteristik pertaniannya, yang tidak saja akan menyangkut masalah lingkungan dan ekonomi perdesaan namun juga akan menyinggung masalah tradisi dan sosio-kultural masyarakatnya yang mau tidak mau harus menerima perubahan tersebut sebagai sebuah realita.

Dampak Pertumbuhan Kota

Dilihat dari kepentingan pertumbuhan wilayah, fenomena perubahan dan pertumbuhan wilayah kota ke arah pinggiran kota harus dipandang tidak hanya dari sudut kepentingan wilayah kota namun juga pada sudut kepentingan desa. Hal ini terkait dengan konsep bahwa eksistensi desa harus diposisikan sebagai *partner* kota yang saling membutuhkan. Ada kecenderungan bahwa pengembangan kegiatan non pertanian di daerah pinggiran kota telah menyebabkan terjadinya kemiskinan di desadesa pinggiran kota serta munculnya marjinalisasi penduduk desa-desa tersebut. Kaum marjinal tersebut dapat disejajarkan dengan kaum miskin di kota, karena mereka tidak memiliki akses terhadap fasilitas sosial-ekonomi yang layak. Mereka itu adalah para petani yang kemudian menyandang predikat buruh tani (*farm laborer*) –karena tidak memiliki sawah-, dan para pemilik tanah kecil (*landness*). Mereka inilah yang kemudian cenderung bermigrasi ke kota untuk menjadi migran permanen dan bekerja di sektor informal serta terpaksa tinggal di lahan-lahan ilegal di kota.

Terkait dengan konsep marjinalisasi yang relevan dan berkembang di daerah

pinggiran kota, Perlman dalam Muta'ali (1997) mengemukakan 2 (dua) pendekatan dalam mendefinisikan marjinalisasi yaitu,

1. Pendekatan psiko-sosial

Menurut pendekatan ini yang dimaksud dengan marjinalisasi adalah individu atau orang yang hidup dalam dua budaya dan tradisi yang berbeda dan tidak dapat menyatu. Jika individu tersebut ingin beradaptasi ia akan mengalami masalah atau kesulitan dengan masa lalu, tradisi, dan ras untuk diterima di lingkungan baru. Ia

Center for Population and Policy Studies

Gadjah Mada University

S. 311, May 23, 2002 3

adalah orang yang berada dalam batas dua budaya dan dua golongan yang tidak dapat menyatu.

2. Pendekatan tradisional-modern

Menurut pendekatan ini, kaum marjinal adalah kaum yang memiliki karakteristik personal untuk tetap menjadi miskin dalam lingkungan perubahan ekonomi dan sosial, karena kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kerugian ekonomi dan disorganisasi, tetapi juga karena kondisi yang memiliki struktur pemikiran dan mekanisme yang tidak dapat ditembus oleh kaum miskin itu sendiri, misalnya sulitnya untuk berpartisipasi dan berintegrasi dalam institusi atau kelembagaan karena adanya perasaan curiga, apatis, kurangnya kemampuan (*skill*) dan pengetahuan.

Perkembangan wacana tentang perkotaan yang semakin meluas telah menjadikan suatu kekuatan tersendiri. Di satu sisi hal itu telah membentuk dominasi wacana dan pemahaman subjektif yang lebih berorientasi pada muatan dan pandangan kuantitatif bagi sebagian kalangan, di sisi lain pemahaman objektif yang lebih berorientasi pada muatan dan pandangan kualitatif masih sangat kurang. Pandangan yang disebut terakhir tersebut telah memicu perhatian para pakar untuk melihat lebih jauh lagi dampak objektif perluasan kota. Akibatnya kemunculan pandangan tentang daerah desa dan kota secara rekonstruktif tidak terhindarkan yang dibangun berdasarkan asumsiasumsi

yang dibangun sebelumnya. Sifat dikotomis desa dan kota kemudian menjadi persoalan yang sangat rumit. Desa di satu sisi masih dipandang sebagai suatu komunitas yang homogen, penuh dengan kegiatan yang bersifat tradisi dan bercorak pertanian. Sementara kota dipandang sebagai kompleksitas wilayah yang berkembang secara heterogen, menggeser tradisi dengan berbagai gaya hidup moderen dan bercorak industri dan perdagangan. Validitas teoritis yang disampaikan Tonnies (1958) -yang nota bene telah melanggengkan sifat dikotomis desa dan kota- sebenarnya melihat masyarakat dalam dua kelompok komunitas besar yaitu komunitas berdasarkan kekerabatan (*kinship*) dan berdasarkan ekonomi dan politik. Pandangan Tonnies tersebut pada hakekatnya telah menggiring pemahaman umum ke dalam celah disparitas desa dan kota.

Pemahaman dikotomis antara desa dan kota telah lebih banyak memberikan kontribusi negatif terhadap eksistensi desa dan menyeret desa-desa pada posisi yang lemah dan sulit terhadap setiap usaha eksploitasi lahan pertanian untuk fungsi non pertanian. Sementara itu praktek eksploitasi lahan di pinggiran perkotaan yang dilakukan oleh para pengembang di bidang perumahan dalam skala besarpun (yang

nota bene tidak didasari oleh suatu konsep perencanaan dan perancangan keruangan yang matang secara fisik dan sosial) agaknya sulit dibendung akibat (1) masih lemahnya kontrol pelaksanaan rencana-rencana di lapangan; (2) kelangkaan perangkat peraturan yang mengatur tata guna lahan baik secara tekstual maupun spasial. Disadari atau tidak praktek eksploitasi lahan yang tidak terkontrol tersebut cepat atau lambat akan menyebabkan terjadinya (1) segmentasi masyarakat dan pluralisasi komunitas di daerah pinggiran kota serta (2) kompleksitas mozaik peruntukan lahan yang mengarah pada gejala fragmentasi lahan.

Besarnya tingkat diferensiasi para pendatang dengan penduduk lokal baik pada kelompok dan pelapisan sosial maupun ekonomi pada banyak kasus telah menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan berinteraksi sosial yang dicerminkan oleh memudarnya kualitas hubungan personal pendatang dan penduduk lokal. Hal ini ditunjang dengan *setting* permukiman mereka yang terbagi secara fisik keruangan yang justru menimbulkan gejala diskordansi spasial (perpecahan keruangan antar kelompok hunian) yang memicu timbulnya superioritas pendatang. Eksklusivitas kelompok sosial pendatang yang sudah terbiasa hidup dalam ritme mekanistik dan cenderung individualistik sering dituding sebagai pemicu munculnya celah sosial dengan masyarakat lokal yang masih berorientasi pada masyarakat organik komunalistik. Wirth (1938) menegaskan bahwa tata cara hidup perkotaan ini merupakan stereotip pandangan hidup masyarakatnya yang kian berkembang.

Center for Population and Policy Studies

Gadjah Mada University

S. 311, May 23, 2002 4

Dari cara pandang linier, proses perluasan kota yang berdampak pada perubahan struktur keruangan dan terpecahnya lahan yang ada menjadi lahan-lahan sempit (fragmentasi lahan) sebenarnya merupakan awal dari percepatan proses konversi lahan. Karena lahan yang relatif kecil akan lebih mudah berpindah tangan kepada para pendatang. Disadari benar bahwa perubahan tersebut di atas tidak harus dipandang sebagai suatu isu yang mengarah pada dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, namun yang penting dan perlu diperhatikan adalah perlunya merumuskan konsideran guna mengarahkan sasaran pengembangannya agar proses perubahan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan arah dan tahapan yang benar.

Secara keruangan menurunnya kuantitas lahan pertanian yang menjadi ciri khas wilayah perdesaan akibat proses perluasan kota yang merambah wilayah perdesaan dapat dilihat pada kasus desa Maguwoharjo yang terletak sekitar 10 km di sebelah timur laut kota Yogyakarta. Penggunaan lahan di desa ini ditandai oleh adanya penggunaan lahan secara campuran antara lahan kedesaan dan lahan kekotaan. Percampuran ini tampaknya semakin intens di daerah-daerah yang memiliki koneksitas tinggi terhadap pusat kota. Tabel berikut menunjukkan proporsi masing-masing jenis penggunaan lahan yang ada ditinjau dari luasannya dengan menggunakan skala desa dan diperoleh dari analisis peta 1.1.

Tabel 1.1

Jenis Penggunaan Lahan Desa Maguwoharjo, Sleman, DIY, 1999

Jenis lahan	Luas (Hektar)	Persen (%)
-------------	------------------	---------------

Persawahan	379,06	31,07
Tegalan	101,81	8,34
Kebun campuran	29,60	2,43
Lahan terbuka	34,96	2,86
Kawasan permukiman (penduduk lokal)	516,75	42,36
Kawasan perumahan baru (pendatang)	15,98	1,31
Kawasan komersial	60,41	4,95
Daerah tubuh perairan	67,79	5,55
Lain-lain	13,64	1,13
Luas desa	1.277,100	100,00

Dari data tersebut terlihat bahwa daerah terbangun di desa ini telah menyamai ruang terbuka yang ada, walaupun bagian terbesar dari daerah ini didominasi oleh permukiman penduduk lokal (42,36%). Proses alih fungsi lahan diperparah oleh pandangan sebagian besar masyarakat desa tentang fungsi tanah. Pada awalnya masyarakat memandang tanah sebagai tanah pusaka yang harus dijaga kelestariannya dengan menciptakan sistem nilai yang mengatur pengalihan hak milik tanah kepada pihak lain. Namun seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, tanah telah berkembang sebagai aset ekonomi yang pada saat tertentu merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pemiliknya, dengan kata lain telah terjadi komersialisasi tanah. Indikatornya adalah (1) pengalihan tanah kepada pihak lain yang terjadi beberapa kali tanpa ada alih fungsi dan (2) melambungnya harga tanah. Kondisi ini telah menyebabkan penduduk lokal menjadikan pekerjaan di sawah sebagai pekerjaan sampingan. Menurunnya minat penduduk terhadap pekerjaan di sektor pertanian juga merupakan faktor pemacu konversi lahan akibat banyaknya alternatif kerja di luar sektor pertanian yang cepat menghasilkan uang (*cash money*). Namun kurangnya wawasan ekonomi dan pemikiran tentang konsep nilai ekonomi tanah yang dikaitkan dengan dunia ekonomi modern pada akhirnya menjebak penduduk lokal pada kondisi yang lebih parah karena mereka justru sering tidak dapat menikmati keuntungan yang layak karena tanahnya dibeli dengan harga murah.

Center for Population and Policy Studies

Gadjah Mada University

S. 311, May 23, 2002 5

Pendekatan pengembangan pola keruangan wilayah

Perumusan pola fisik spasial suatu wilayah merupakan tahap paling awal yang harus dilakukan dalam rangka menentukan peruntukan keruangannya. Gallion dan Eisner (1980) mengemukakan bahwa pola fisik keruangan suatu wilayah dapat dikenali melalui pemahaman pola tata guna tanah yang diimplementasikan di wilayah tersebut. Distribusi fungsi lahan yang direncanakan secara proporsional akan merupakan modal penting untuk mencapai keseimbangan pengembangan fisik, ekonomi dan sosio kultural wilayah. Lebih jauh dikatakannya bahwa perencanaan tata guna lahan yang benar akan memberikan dampak positif terhadap angka pertumbuhan karakter, fisik, kualitas dan pola lingkungan keruangan wilayah.

Isu sentral dari penentuan arah pola keruangan di daerah pinggiran kota untuk masa depan adalah isu pengembangan wilayah. Secara umum isu pengembangan dapat diidentifikasi melalui,

1. Identifikasi tujuan dan prinsip-prinsip pengembangan area peruntukan baik untuk permukiman, komersial, rekreasi, pendidikan maupun industri.
2. Identifikasi pola pengembangan dan pelestarian alam lingkungan yang berada di wilayah pinggiran kota.
3. Identifikasi fokus wilayah yang secara dominan memiliki potensi kurang mampu berkembang
4. Identifikasi perencanaan dan pengembangan wilayah yang komprehensif
5. Identifikasi implementasi program tata guna lahan secara efektif untuk melayani kepentingan penduduk sesuai dengan program perencanaan dan pengembangan yang telah ditetapkan guna mengelola pengembangan wilayah pada masa mendatang.

Kelima identifikasi tersebut akan menghasilkan beberapa peta tematik yang kemudian perlu disistesisikan (*superimposed*) antar peta. Hasil dari sintesis peta tersebut akan menghasilkan apa yang kemudian disebut sebagai pola keruangan guna lahan yang kemudian diformulasikan lebih lanjut guna mendapatkan gambaran topologi dan tipologi keruangan. Tipe-tipe keruangan yang ada kemudian dianalisis secara induktif untuk dibuat generalisasi tipe keruangannya sehingga pola dasar tata ruangnya dapat distrukturkan dan model tata ruangnya dapat diformulasikan.

Dalam konteks wilayah, ruang-ruang yang berada di dalam wilayah tersebut akan membentuk struktur ruang yang disebut oleh Gallion sebagai unit ketetanggaan (*neighborhood unit*). Unit ketetanggaan ini sebenarnya tidak memiliki konotasi yang terkait dengan fenomena sosiologi. Istilah tersebut lebih bermakna lingkungan fisik yang secara spasial mengarah pada pemahaman ruang yang humanis. Busnell dalam Gallion (1980) menterjemahkan makna humanis tersebut sebagai suatu kondisi wilayah di mana kontrol secara langsung terhadap ruang-ruang (bentuk dan luasan) serta kegiatan di dalam wilayah tersebut dapat dilakukan oleh penduduknya. Di daerah perdesaan di pinggiran kota hal ini masih mungkin dilakukan mengingat karakter hubungan interpersonal

di perdesaan masih dapat ditemui. Pola pendekatan di atas ditujukan agar pola pemanfaatan lahan kekotaan di daerah pinggiran kota tidak terjadi secara melompatlompat

(*leap frogging development*). Pola perluasan kota yang terkendali tersebut dikenal dengan istilah akresi (*accretion expansion*). Tujuan dari pendekatan pengembangan pola keruangan wilayah ini adalah untuk mewujudkan kebijaksanaan perluasan kota yang memperhatikan kepentingan sosio-kultural dan ekonomi desa dan dapat lebih diorientasikan pada distribusi merata yang mampu mengintegrasikan tata nilai fisik dengan realitas sosial dan kultural wilayah.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kegiatan perluasan kota ke wilayah pinggiran kota yang tanpa batas dan kurang terkendali dapat mengakibatkan kesenjangan antara kondisi fisik spasial dengan kondisi sosio-kultural masyarakatnya.

Center for Population and Policy Studies

Gadjah Mada University

S. 311, May 23, 2002 6

Pada akhirnya akan bermuara pada kesenjangan antara strategi pembangunan pertanian dan perkotaan. Untuk itu pembangunan wilayah pinggiran kota harus dipahami bukan

sebagai bentuk lain dari perluasan kota. Konsekwensinya pembangunannya hendaknya dipadukan dengan kebijakan pengembangan kota antar regional (desa-kota), sehingga pola perluasan keruangnya dapat lebih diorientasikan pada distribusi merata yang mampu mengintegrasikan tata nilai fisik dan sosial wilayah. Hal ini perlu dikembangkan guna menunjang interaksi ekonomi, sosial, kultural serta mengedepankan peran positif yang disandang oleh para pendatang. Hal ini juga untuk mendorong dan mengembangkan pertumbuhan daerah pinggiran sekaligus mengeliminasi ketimpangan antara pertumbuhan kota dan desa serta keseimbangan ekologis dan sosio-kultural antara regional. Perluasan kota bukanlah sekadar pengaturan tata ruang dan batas fisik semata, namun juga menyangkut ideologi dan kondisi dinamika sosiologis masyarakatnya. Untuk itu kebijaksanaan dan upaya pengembangan strategi pembangunan tetap perlu diorientasikan pada eksistensi dan aspirasi masyarakat di pinggiran kota.

Ucapan terima kasih:

Terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional melalui Lembaga Penelitian UGM yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan serangkaian penelitian di desa-desa pinggiran kota Yogyakarta dalam kurun waktu 1996 hingga 2001 melalui kegiatan Penelitian Ilmu Pengetahuan Dasar (1996-1997) dan Penelitian Hibah Bersaing VIII (1999-2001) sehingga penulisan ini, sebagai salah satu dari serial penulisan tentang perkembangan daerah pinggiran kota dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada saudara Setiadi (PPSK-UGM), saudara MR Djarot Sadharto Widyatmoko (Fakultas Geografi UGM) dan saudara Gutomo Bayu Aji (LIPI-Jakarta) yang telah membantu peneliti dalam mengadakan penelitian di lapangan.

Daftar Pustaka

- Beesly, Ken and Russwurm, Lorne, 1981, *The Rural-Urban Fringe: Canadian Perspective*, Waterloo: Geographical Monographical No. 10
- Bintarto, 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia
- Cernea, Michael M, 1988, *Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan*, Publikasi Bank Dunia, Penerbit Universitas Indonesia
- Dowald, David, 1978, *Theories of Urban Form and Landuse : A Review*, Working Paper 295, Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley
- Gallion, Arthur B, dan Eisner, Simon, 1980, *The American Urban Planning Pattern: City Planning and Design*, Van Nostrand Co, New York
- Goddiener, Mark, 1985, *The Social Production of Urban Space*, Austin: University of Texas Press
- Luthi Muta'ali, 1997, *Dampak Transformasi Wilayah Perkotaan terhadap Integrasi Ruang Sosial Ekonomi dan Marjinalisasi Penduduk Lokal di Koridor Segitiga Joglosemar*, Urge Project-RRDP, Fakultas Geografi-UGM
- McGee, Terry, 1990, *The Future of the Asian City: The Emergence of Desa-Kota Regions*, paper

on International Seminar on The Southeast Asian City of the Future
T.Yoyok Wahyu Subroto, 1996, *Keterkaitan antara Nilai dan Perwujudan Ruang Kawasan Perdesaan*, Jurnal Pusat Studi Lingkungan Hidup, UGM, Nomor 10, Th. IV., Edisi Desember 1996, pp 50-62
-----, 1997, *Pola Perubahan Spasial Daerah Pinggiran Kota (Urban Fringe)*, Majalah Ilmiah Teknologi: Media Teknik No. 4, th XIX, Edisi Nopember 1997, pp 10-16
Center for Population and Policy Studies
Gadjah Mada University
S. 311, May 23, 2002 7
-----, 2001, *Model Pola Ruang Konsentris untuk Restrukturisasi Daerah Pinggiran Kota (Urban Fringe) di Indonesia. Studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, Laporan Penelitian Hibah Bersaing VIII tahun 1999-2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
Wirth, L, 1938, *Urbanism as a Way of Life*, American Journal of Sociology
Yayadinata, Johara T, 1992, *Tata Guna Tanah dalam Pemecahan Perdesaan Perkotaan dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung
Yunus, Hadi Sabari, 1987, *Permasalahan Daerah Urban Fringe dan Alternatif Pemecahannya*, makalah tidak dipublikasikan
-----, 2001 *Perubahan Pemanfaatan Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Disertasi Program Doktor, UGM